



MANUAL INDIKATOR KINERJA STASIUN KIPM ACEH TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Manual Indikator Kinerja tahun 2025 disusun untuk menjadi arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sebagai tolak ukur wujud pertanggungjawaban SKIPM Aceh dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat diperoleh data capaian keberhasilan kinerja yang akurat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya serta dapat memacu peningkatan kinerja organisasi.

Kami berharap Manual Indikator Kinerja ini dapat bermanfaat dalam memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sebagai pertanggung jawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja SKIPM Aceh di masa mendatang.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Manual Indikator Kinerja ini.

Aceh Besar, 3 Februari 2025

Kepala SKIPM Aceh



Diky Agung Setiawan, S.St.Pi, M.Si

Manual IK SKIPM Aceh	IK 1 / IKS. 01.01				
Sasaran :	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan				
Indikator Kinerja :	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)				
Deskripsi :	Definisi :				
	▪ Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. ▪ Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. ▪ Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. ▪ Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: 1. Standar Nasional Indonesia (SNI) 2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku ▪ Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.				
	Formula : $\% X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} X 100\%$ A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB B = Persentase Unit menerapkan CPIB C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB F = Persentase Unit Usaha menerapkn CPIB Kapal; xn = Jumlah dari unsur pembentuk. xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6*) <i>*) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yg ada UPT</i>				
Satuan Pengukuran:	%				
Tingkat Validitas:	(X) Output Tk. Kendali Rendah		() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome	
Sumber Data :	SKIPM Aceh				
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi		() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading:	() Adopsi Langsung	() Dipersempit	(X) Komponen Pembentuk	() Buat Baru	
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan :	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan	
Tabel Data	2023		2024		2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	-	-	70	100	70

Manual IK SKIPM Aceh	IK 2 / IKS. 01. 02				
Sasaran :	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan				
Indikator Kinerja :	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)				
Deskripsi :	Definisi :				
	- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. - Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. - Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan. - Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: - Standar Nasional Indonesia (SNI); - Standar Internasional (Codex Alimentarius); - Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. - Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah maupun secara manual.				
	Formula : $\% X = \frac{A+B}{xn} X 100\%$ A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk B = Presentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP xn = Jumlah dari unsur pembentuk				
Satuan Pengukuran:	(%) Persentase				
Tingkat Validitas:	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome		
Sumber Data :	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen				
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir		
Metode Cascading:	() Adopsi Langsung	(X) Lingkup Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat Baru	
Polarisasi :	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize		
Periode Pelaporan :	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan	
Tabel Data	2023		2024		2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	-	-	70	106,66	70

Manual IK SKIPM Aceh	IK 3 / IKS.01.03				
Sasaran :	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan				
Indikator Kinerja :	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Lokasi)				
Deskripsi :	Definisi :				
	▪ Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. ▪ Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran <i>marine biotoxin</i> dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP. ▪ Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan Lokasi wilayah Perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestik yang bebas dari cemaran <i>marine biotoxin</i> dan cemaran kimia berbahaya.				
	Formula : Menghitung jumlah kab/kota yang menjadi lokasi pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik				
Satuan Pengukuran:	Lokasi				
Tingkat Validitas:	☒ Output Tk. Kendali Rendah		☐ Output Tk. Kendali Tinggi		☐ Outcome
Sumber Data :	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen				
Jenis Perhitungan Data :	☐ Akumulasi		☐ Rata-Rata		☒ Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading:	☐ Adopsi Langsung	☒ Lingkup Dipersempit		☐ Komponen Pembentuk	☐ Buat Baru
Polarisasi :	☒ Maximize		☐ Minimize		☐ Stabilize
Periode Pelaporan :	☐ Bulanan	☐ Triwulanan		☒ Semesteran	☐ Tahunan
Tabel Data	2023		2024		2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	2	2	-	-	1

Manual IK SKIPM Aceh	IK 4 / IKS. 01.04				
Sasaran :	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan				
Indikator Kinerja :	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)				
Deskripsi :	Definisi :				
	▪ Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor). ▪ Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional. ▪ Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan.				
	Formula : $x = \frac{A-B}{A} \times 100 \%$ x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%) A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan				
Satuan Pengukuran:	% (Persentase)				
Tingkat Validitas:	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome		
Sumber Data :	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen / SKIPM Aceh				
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir		
Metode Cascading:	() Adopsi Langsung	(X) Lingkup Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat Baru	
Polarisasi :	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize		
Periode Pelaporan :	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran	() Tahunan	
Tabel Data	2023		2024		2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	-	-	99	100	99

Manual IK SKIPM Aceh	IK 5 / IKS. 02.01				
Sasaran :	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar				
Indikator Kinerja :	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh				
Deskripsi :	Definisi :				
	- ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri - Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji di laboratorium official control - Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 yang dinilai melingkupi: - Ruang Lingkup - Acuan Normatif - Persyaratan Umum - Persyaratan Struktural - Persyaratan Sumber Daya - Persyaratan Proses - Persyaratan Sistem Manajemen				
	Formula : $\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n}$ X = Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17025 yang terverifikasi $x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke – 1, 2 , 3, ..., n n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan				
Satuan Pengukuran:	Nilai				
Tingkat Validitas:	(X) Output Tk. Kendali Rendah		() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome	
Sumber Data :	BPPMHKP				
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi		() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading:	() Adopsi Langsung	(X) Lingkup Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat Baru	
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan :	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan	
Tabel Data	2023		2024		2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	-	-	-	-	75

Manual IK SKIPM Aceh	IK 6 / IKS. 02.02				
Sasaran :	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar				
Indikator Kinerja :	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh				
Deskripsi :	Definisi :				
	- ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. - Nilai kualitas penerapan Iso/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020). - Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai melingkupi: 1. Ruang Lingkup 2. Acuan Normatif 3. Persyaratan Umum 4. Persyaratan Struktural 5. Persyaratan Sumber Daya 6. Persyaratan Proses 7. Persyaratan Sistem Manajemen				
	Formula : $\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n}$ X = Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17020 yang terverifikasi $\frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n}$ = Nilai tingkat pemenuhan ke – 1, 2 , 3, ..., n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan				
Satuan Pengukuran:	Nilai				
Tingkat Validitas:	(X) Output Tk. Kendali Rendah		() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome	
Sumber Data :	BPPMHKP				
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi		() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading:	() Adopsi Langsung	(X) Lingkup Dipersempit	() Komponen Pembentuk	() Buat Baru	
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan :	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan	
Tabel Data	2023		2024		2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	-	-	-	-	75

Manual IK SKIPM Aceh	IK 7 / IKS 03.01																													
Sasaran :	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan																													
Indikator Kinerja :	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh																													
Deskripsi :	Definisi :																													
	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.																													
	Formula : $\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div Konversi\ Bobot - Dispensasi\ SPM$ <table><thead><tr><th>No</th><th>Uraian Indikator IKPA</th><th>Bobot (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Revisi DIPA</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>Deviasi RPD</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>Penyerapan Anggaran</td><td>20</td></tr><tr><td>4</td><td>Belanja Kontraktual</td><td>10</td></tr><tr><td>5</td><td>Penyelesaian Tagihan</td><td>10</td></tr><tr><td>6</td><td>Pengelolaan UP dan TUP</td><td>10</td></tr><tr><td>7</td><td>Dispensasi SPM</td><td>(Pengurang Nilai IKPA)</td></tr><tr><td>8</td><td>Capaian Output</td><td>25</td></tr></tbody></table> - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.				No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)	1	Revisi DIPA	10	2	Deviasi RPD	15	3	Penyerapan Anggaran	20	4	Belanja Kontraktual	10	5	Penyelesaian Tagihan	10	6	Pengelolaan UP dan TUP	10	7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)	8	Capaian Output
No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)																												
1	Revisi DIPA	10																												
2	Deviasi RPD	15																												
3	Penyerapan Anggaran	20																												
4	Belanja Kontraktual	10																												
5	Penyelesaian Tagihan	10																												
6	Pengelolaan UP dan TUP	10																												
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)																												
8	Capaian Output	25																												
Satuan Pengukuran:	Nilai																													
Tingkat Validitas:	() Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Outcome																											
Sumber Data :	BKementerian Keuangan																													
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir																											
Metode Cascading:	(X) Direct		() Non Direct																											
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize																										
Periode Pelaporan :	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran	() Tahunan																										
Tabel Data	2023		2024		2025																									
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target																									
	93,75	97,47	93,76	98,41	92																									

Manual IK SKIPM Aceh	IK 8 / IKS .03.02														
Sasaran :	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan														
Indikator Kinerja :	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh														
Deskripsi :	Definisi :														
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.														
	Formula : $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO PenggunaanSBK : Penggunaan SBK NEAlokasi : Nilai Efektivitas Alokasi WCRO : Bobot Capaian RO WpenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi NKA Unit Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut: <table><thead><tr><th>Variabel</th><th>Uraian</th><th>Bobot (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Efektivitas (75%)</td><td>1. Capaian Indikator RO</td><td>75</td></tr><tr><td rowspan="2">Efisiensi (25%)</td><td>1. Nilai Efisiensi Satker</td><td>10</td></tr><tr><td>2. Efisiensi SBK</td><td>15</td></tr></tbody></table>				Variabel	Uraian	Bobot (%)	Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75	Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10	2. Efisiensi SBK	15
Variabel	Uraian	Bobot (%)													
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75													
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10													
	2. Efisiensi SBK	15													
Satuan Pengukuran:	Nilai														
Tingkat Validitas:	() Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Outcome												
Sumber Data :	Kementerian Keuangan														
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir												
Metode Cascading:	(X) Direct		() Non Direct												
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize											
Periode Pelaporan :	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan											
Tabel Data	2023		2024		2025										
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target										
	-	-	71	92,50	71,5										

Manual IK SKIPM Aceh	IK 9 / IKS.03.03				
Sasaran :	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan				
Indikator Kinerja :	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh				
Deskripsi :	Definisi :				
	Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosure</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.				
	Formula : Jumlah Rekomendasi BPK Lingkup UPT..... Yang Ditindaklanjuti X 100% Jumlah Total Rekomendasi BPK Lingkup UPT				
Satuan Pengukuran:	%				
Tingkat Validitas:	(X) Output Tk. Kendali Rendah		() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome	
Sumber Data :	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); BPPMHKP				
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi		() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading:	(X) Direct		() Non Direct		
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan :	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan	
Tabel Data	2023		2024		2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	100	100	100	100	100

Manual IK SKIPM Aceh	IK 10 / IKS. 03.04				
Sasaran :	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan				
Indikator Kinerja :	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh				
Deskripsi :	Definisi :				
	▪ Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. ▪ Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.				
	Formula :				
	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$$IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$$IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$				
	Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin				
	W_{1j} * R_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j W_{2k} * R_{2k} = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k W_{3l} * R_{3l} = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l W_{4m} * R_{4m} = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m				
Satuan Pengukuran:	Indeks				
Tingkat Validitas:	(X) Output Tk. Kendali Rendah		() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome	
Sumber Data :	Biro SDMAO; BKN				
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi		() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading:	(X) Direct			() Non Direct	
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize		() Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran		() Tahunan
Tabel Data	2023		2024		2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	84	89,89	86	91,94	87

Manual IK SKIPM Aceh	IK 11 / IKS. 03.05					
Sasaran :	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan					
Indikator Kinerja :	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh					
Deskripsi :	Definisi :					
	▪ Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. ▪ Nilai PM SAKIP Level II dihitung berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP.					
	Formula : Nilai PM SAKIP Level II adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I *Apabila penilaian tidak dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Mitra, maka nilai SAKIP Level II diperoleh melalui Penilaian Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP					
Satuan Pengukuran:	Nilai					
Tingkat Validitas:	☒ Output Tk. Kendali Rendah		☐ Output Tk. Kendali Tinggi		☐ Outcome	
Sumber Data :	Inspektorat Jenderal KKP dan/atau Sekretariat BPPMHKP					
Jenis Perhitungan Data :	☐ Akumulasi		☐ Rata-Rata		☒ Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading:	☒ Direct			☐ Non Direct		
Polarisasi :	☒ Maximize		☐ Minimize		☐ Stabilize	
Periode Pelaporan :	☐ Bulanan		☐ Triwulanan		☐ Semesteran	☒ Tahunan
Tabel Data	2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
	-	-	81	85,50	86	

Manual IK SKIPM Aceh	IK 12 / IKS.03.06				
Sasaran :	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan				
Indikator Kinerja :	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh				
Deskripsi :	Definisi :				
	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan ltjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran				
	Formula : Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja x 100%				
Satuan Pengukuran:	%				
Tingkat Validitas:	☒ Output Tk. Kendali Rendah		☐ Output Tk. Kendali Tinggi		☐ Outcome
Sumber Data :	Inspektorat Jenderal KKP				
Jenis Perhitungan Data :	☐ Akumulasi		☐ Rata-Rata		☒ Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading:	☒ Direct			☐ Non Direct	
Polarisasi :	☒ Maximize		☐ Minimize		☐ Stabilize
Periode Pelaporan :	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran		☐ Tahunan
Tabel Data	2023		2024		2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	70 %	100 %	75 %	100 %	85 %

Manual IK SKIPM Aceh	IK 13 / IKS. 03.07				
Sasaran :	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan				
Indikator Kinerja :	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh				
Deskripsi :	Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).				
	Formula : Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP = $\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$				
Satuan Pengukuran:	%				
Tingkat Validitas:	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome		
Sumber Data :	Biro Umum dan PBJ				
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir		
Metode Cascading:	(X) Direct		() Non Direct		
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan :	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan	
Tabel Data	2023		2024		2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	-	-	-	-	76 %

Manual IK SKIPM Aceh	IK 14 / IKS. 03.08				
Sasaran :	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan				
Indikator Kinerja :	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh				
Deskripsi :	Definisi :				
	Nilai Pembangunan Integritas UPT diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%) b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%) d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%) e. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%) f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit UPT disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal / BPPMHKP KKP				
	Formula : Menghitung Prosentase Nilai Pembangunan Integritas UPT diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal / BPPMHKP KKP				
Satuan Pengukuran:	%				
Tingkat Validitas:	(X) Output Tk. Kendali Rendah		() Output Tk. Kendali Tinggi	() Outcome	
Sumber Data :	Inspektorat Jenderal / BPPMHKP KKP				
Jenis Perhitungan Data :	() Akumulasi		() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading:	(X) Direct			() Non Direct	
Polarisasi :	(X) Maximize		() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan :	() Bulanan		() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Tabel Data	2023		2024		2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
	-	-	-	-	70

Manual IK SKIPM Aceh	IK 15 / IKS. 03.09			
Sasaran :	Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah Dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			
Indikator Kinerja :	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh			
Deskripsi :	Definisi :			
	▪ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. ▪ Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/login. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP. ▪ Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.			
	Formula : Bobot Nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$			
	Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25			
Satuan Pengukuran:	Nilai			
Tingkat Validitas:	☒ Output Tk. Kendali Rendah		☐ Output Tk. Kendali Tinggi	
Sumber Data :	https://ptsp.kkp.go.id/			
Jenis Perhitungan Data :	☐ Akumulasi		☐ Rata-Rata	
Metode Cascading:	☐ Direct		☐ Non Direct	
Polarisasi :	☒ Maximize		☐ Stabilize	
Periode Pelaporan :	☐ Bulanan		☒ Triwulanan	
Tabel Data	2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	-	-	-	-
			2025	
			Target	
			88	